



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNYONO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **643422**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **840.000.000**

1. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, WARISAN Rp. 130.000.000
2. Bangunan Seluas 225 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 1.355 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
4. Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **482.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO FEAT NF11T11CO1 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI - XPANDER ULTIMATE MITSUBISHI/XPANDER 1.5 L ULTIMATE-L 4X2 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOBIL, HONDA BRV DG3 1,5L PRE-HS CVT / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	89.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	243.807.057
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.656.007.057
III. HUTANG	Rp.	72.645.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.583.362.057

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.